

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Dari 216 perempuan yang dicalonkan oleh Partai Golkar pada pemilu legislatif, 19 perempuan berhasil memenangkan suara. Berdasarkan hasil penelusuran latar belakang oleh peneliti terhadap 19 perempuan terpilih, ditemukan bahwa sejumlah 12 perempuan masih terindikasi dan dibayangkan oleh ikatan dengan elit Partai Golkar, dengan status sebagai istri, anak perempuan, adik perempuan, dan menantu. Sebagai aktor penting dalam proses kandidasi dan pencalonan, partai politik bertanggung jawab dalam menghasilkan anggota-anggota DPR yang kompeten. Akan tetapi, dengan melihat bahwa Partai Golkar masih menghasilkan 12 perempuan dengan latar belakang dinasti, menunjukkan bahwa Partai Golkar belum menerapkan sistem merit dengan maksimal. Hasil temuan peneliti dengan melakukan *background checking* dari setiap kader perempuan yang terpilih, faktanya menghasilkan nama-nama dengan indikasi nepotisme dan akar dari nepotisme adalah setiap unsur dan aktor di dalam pemilu, baik itu partai maupun kader. Dari 19 perempuan terpilih, terdapat 12 perempuan yang berlatar belakang kekerabatan, yang artinya sebesar 63,16% perempuan tidak dihasilkan melalui meritokrasi. Sebagai partai politik dengan sejarah KKN yang lama dan kuat, Partai Golkar perlu membenahi proses kandidasi dan pencalonan, dengan sungguh-sungguh menerapkan sistem merit. Meskipun hasil wawancara dengan Puteri Komarudin selaku kader perempuan Partai Golkar terpilih periode 2019 menyatakan bahwa Partai Golkar mengkandidasi perempuan sesuai dengan potensi dan dedikasinya terhadap partai dan area tertentu, penemuan peneliti berbeda. Penelitian ini menunjukkan bahwa Partai Golkar belum menerapkan 100% secara terbuka dan meritokrasi dalam proses rekrutmen dan kandidasi. Partai Golkar masih menjadi partai yang mementingkan kemenangan suara partai di atas kemampuan kadernya.

## 5.2. Saran

### 5.2.1. Saran Praktis

Berdasarkan penelitian ini, peneliti memberikan saran kepada para praktisi dan aktor politik, terutama KPU, BAWASLU, dan Partai Golkar dalam menjalani setiap proses kebijakan afirmasi sebagai hal yang penting untuk menjunjung tinggi perwakilan yang representatif.

*Pertama*, sebagai sebuah lembaga dan aktor politik, perlu memiliki kesadaran bahwa keterwakilan perempuan merupakan hal yang penting untuk menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap gender.

*Kedua*, untuk tidak menggunakan “jalan pintas” dalam merekrut perempuan. Partai politik sebagai *gatekeeper*, pintu utama bagi perempuan untuk dapat berpolitik tentu harus menjalani kebijakan afirmasi dengan adil dan melihat secara terbuka terhadap dan berdasarkan kualitas.

*Ketiga*, sebagai sebuah lembaga yang mengawas, BAWASLU perlu membuat kebijakan mengenai *background checking* dari setiap calon anggota legislatif, untuk mengurangi sampai menghilangkan indikasi nepotisme dalam proses pencalonan dan pemilihan, dengan melihat keterkaitan perempuan dengan elit partai maupun tokoh politik di daerah pemilihan yang ditentukan.

*Keempat*, melihat kembali mengenai pernyataan Ardhana Ulfa Azis, bahwa perempuan seringkali sulit menang ketika tidak ditempatkan di daerah pemilihan darimana perempuan itu berasal, mengukuhkan bahwa tanpa relasi dan *branding*, peluang perempuan untuk terpilih sangatlah kecil. Maka dari itu diperlukan sudut pandang yang responsif gender baik kepada pemilih maupun setiap kader partai. Alangkah lebih baik apabila sosialisasi pemilih untuk memilih perempuan tidak dilakukan ketika akan pemilu saja, tetapi perlu dijadwalkan sebagai agenda yang rutin.

### 5.2.2. Saran Teoritis

Penelitian ini perlu untuk diteliti lebih lanjut sebagai bentuk perhatian terhadap kebijakan afirmasi dan keterwakilan perempuan. Peneliti memiliki beberapa saran untuk penelitian berikutnya:

*Pertama*, penelitian selanjutnya perlu mengaitkan lebih dalam mengenai nomor urut dengan keterpilihan perempuan. Hal ini untuk juga melihat mana yang lebih besar pengaruhnya dalam keterpilihan perempuan, apakah nomor urut atau relasi kuasa, atau keduanya saling berkesinambungan.

*Kedua*, penelitian ini belum menemukan hasil yang lebih dalam dikarenakan belum dalam melakukan wawancara dengan KPU dan tidak melakukan wawancara langsung dengan Anggota DPR Perempuan Terpilih Partai Golkar periode 2019-2024, sehingga untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan wawancara dengan Anggota DPR Perempuan Terpilih periode 2019-2024 maupun periode 2024-2029 yang berindikasi nepotisme, untuk melihat dari sudut pandang mereka mengenai hal ini.

*Ketiga*, penelitian ini perlu mewawancarai pengurus BAPPILU untuk menjelaskan lebih dalam apakah nepotisme ini termasuk ke dalam strategi partai untuk memenuhi persyaratan pemilu.